

Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur Dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis

Rahmawati ¹⁾, Nihayatus Sholichah ²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: rahmavenusz14@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi; pembinaan dan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia sarana dan prasarana olahraga. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan Olahraga. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan atlet bulutangkis dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan atlet bulutangkis di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dispora dan untuk mengetahui hambatan dan pendukung pembinaan atlet bulutangkis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Timur dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis sudah melakukan peran nya dengan baik, meski memiliki hambatan dalam pelaksanaan perannya. Saran dari penulis adalah meningkatkan lagi dari segi fasilitas pembinaan dan fasilitas atlet yang sudah berprestasi dan memperbaiki hambatan-hambatan yang ada.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pembinaan Atlet

Abstract

The Department of Youth, Sports and Tourism has the task of carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and assistance in the fields of Youth, Sports, Tourism and Creative Economy. coaching and development of educational sports; coaching and development of achievement sports and recreational sports; fostering and developing institutions, human resources, sports facilities and infrastructure. evaluation and preparation of work implementation reports in the Sports Development Sector. The problems in this study are how the role of the Youth and Sports Office of East Java Province in coaching badminton athletes and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the badminton athlete coaching program in East Java Province. The purpose of this study was to determine the role of dispora and to find out the obstacles and supporters of badminton athlete development. This study uses a qualitative method. From the results of interviews and observations of each indicator, it can be stated that the role of the East Java Province Youth and Sports Service (DISPORA) in the Coaching of Badminton Athletes has performed its role well, although it also has obstacles in the implementation of its role. Suggestions from the author is to improve again in terms of coaching facilities and facilities for athletes who have excelled and improve existing obstacles.

Keywords: The Role of Government, Athlete Development.

A. LATAR BELAKANG

Pada era modern dan pandemi sekarang, olahraga sangat diwajibkan untuk semua masyarakat tua, muda dan anak – anak, sebagai meningkatkan daya tahan dan immune tubuh setiap individu. Olahraga juga sebagai terapi alternatif dalam kejenuhan bekerja dan sebagai obat alami terhindari dari serangan jantung. Pada hakikatnya olahraga bisa dikatakan sebagai aktivitas fisik yang memenuhi kebutuhan pada tubuh kita dan olahraga harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Olahraga yang terkenal pada masyarakat meliputi sepakbola, futsal, voli, basket dan bulutangkis.

Olahraga di Indonesia yang mewakili berbagai kejuaraan dunia yaitu cabang olahraga bulutangkis. Bulutangkis merupakan olahraga yang dimainkan 2-4 orang, tujuan olahraga bulutangkis ini dalam satu tim harus mencetak point dengan cara mengkasihkan bola sulit untuk lawan. Olahraga ini menarik berbagai kelompok umur, kelompok tingkat keterampilan, dan pria maupun diluar ruangan untung ajang rekreasi, juga sebagai ajang persaingan.

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. **Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional** yang menyatakan bahwa keolahragaan nasional

bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Bulutangkis adalah olahraga termahal menurut peneliti karena dari semua fasilitas seperti raket, sepatu, senar, shuttlecock yang membuwang biaya mahal terhadap atlet, bahkan pemerintah provinsi jawatimur seperti Dispora atau Pbsi jarang memadai fasilitas tersebut terhadap atlet yang berprestasi. Bahkan juga pemerintah Dispora dan Pbsi jarang memberikan insentif terhadap atlet bulutangkis, istilahnya itu uang capek terhadap atlet. Bahkan peneliti kecewa terhadap pemerintah yang menduduki di bidang olahraga yang kurang perhatian terhadap atlet di jawatimur.

Sasaran pembinaan atlet tertuju pada beberapa aspek penting, seperti Sikap mental terhadap pelaksanaan pelatihan meliputi, kesedian untuk melaksanakan kerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih, dan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam sebuah tim, dan aspek yang paling penting dalam pembinaan atlit yaitu harus tersedianya sarana dan prasarana. Menurut **Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional** Bab VII pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat 2 menyatakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian,

pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan dan keolahragaan.

Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga. Tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Bab V tentang system keolahragaan nasional pada pasal 13, ayat 1 dan 2 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi pengawasan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan dibidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga yang sangat populer yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pembibitan atlet, dan alat-alat infrastruktur yang diterapkan pada pola pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat kemudian menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas pemerintah daerah melalui strategi pembinaan masyarakat yang tepat dapat dilihat dari Kewenangan Pemerintah tersebut. Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang kemudian mempunyai fungsi membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan

pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahap-tahap pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga melalui dari keluarga,sekolah sampai kelembaga keolahragaan.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan olahraga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk memasyarakatkan olahraga kepada semua kalangan. Selain itu bertujuan untuk membantu mensejahterakan pecinta olahraga dan juga masyarakat. Kemudian, juga berguna menciptakan sumber daya yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang telah tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional” yang menyatakan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia disiplin, sportivitas, memperkuat ketahanan nasional, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa” .

Selanjutnya, tujuan dari Olahraga itu sendiri sangat beragam. hingga mengeluarkan berbagai pengertian olahraga yang sangat luas serta banyak yang menganggap bahwa olahraga hanya sebagai hobi, mempercepat proses diet, atau keinginan membentuk otot tubuh. Namun ada juga yang hanya menjadikannya sebagai kegiatan bermain.

Salah satu cara untuk memajukan prestasi olahraga adalah dengan melaksanakan ajang olahraga tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.



Kejuaraan olahraga salah satunya diselenggarakan pemerintah di tingkat daerah adalah Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dan Pekan Olahraga Nasional (PON). Namun, dibalik itu semua tentunya perlu menyusun program pembinaan yang baik agar mencapai target yang maksimal.

Prestasi atlet dapat dicapai, salah satunya melalui program pemusatan latihan atau pelatihan cabang (PELATCAB) sehingga latihan menjadi terprogram, teratur, dan terukur dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya atlet lebih siap dalam menghadapi kejuaraan ditingkat daerah. Selain itu juga perlu memperhatikan bagaimana sarana dan prasarana pendukung untuk semakin meningkatkan latihan yang telah tersusun dengan baik.

Kemudian salah satu komponen dalam menunjang prestasi atlet yaitu dengan meningkatkan latihan, salah satunya latihan fisik. Latihan fisik dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga untuk mencapai prestasi yang maksimal. Karena, latihan fisik merupakan dasar pada setiap cabang olahraga. Faktor yang bisa memacu dalam perkembangan prestasi dalam olahraga diantaranya adalah adanya peningkatan kualitas dalam pelatihan dan pembinaan atlet-atlet terpilih. Upaya untuk peningkatan prestasi dalam olahraga juga harus melalui latihan yang dilakukan dengan pendekatan.

Dengan *support* dari berbagai disiplin ilmu yang terkait maka akan dapat dikembangkan teori latihan yang benar. Prestasi atlet tidak dapat dicapai dengan cepat, tetapi harus melalui beberapa tahap seperti perencanaan latihan (*training*

plan), latihan yang terprogram dan sistematis serta berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Menurut Carl I. Fredrick yang dikutip Nugroho (2003) mendefinisikan kebijakan publik yaitu seseorang yang sebuah tindakan, pemerintah atau kelompok dalam lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, yang diusulkan tersebut ditujukan untuk mengatasi hambatan yang ada sekaligus memanfaatkan potensi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Nasucha (2004), mengatakan jika kebijakan publik adalah kewenangan mutlak pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Tujuan kebijakan tersebut untuk menampung permasalahan sosial yang ada di dalam tatanan masyarakat dan yang akan dijadikan acuan dasar perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social masyarakat yang harmonis

2. Peran

Sedangkan menurut Mertono (Raho, 2007) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang di harapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang di miliki seseorang yang menduduki status social tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang

apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

3. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P (2009). Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010).

4. Model Peran Pemerintah

Gede Diva (2009:15-18), Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

- a) Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah provinsi memberikan fasilitas sebuah pelatihan yang memiliki

peran untuk membantu dan memudahkan peserta dalam pembinaan cabang olahraga di setiap kabupaten atau kota, tugas fasilitator pemerintah selalu membantu memfasilitasi kebutuhan para peserta dalam pelatihan agar bisa membantu perkembangan setiap kabupaten dan kota yang ada di provinsi masing-masing.

- b) Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pemerintah provinsi membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk perkembangan dan kemajuan atlet di setiap provinsi, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif.

- c) Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah provinsi sebagai katalisator perkembangan atlet adalah mempercepat proses perkembangan untuk berprestasi menjadi juara. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah atau proses pembinaan dan pelatihan terhadap atlet bulutangkis di jawa timur.

5. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai

tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih efektif.

Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang dimiliki, *delearning*, berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup dan kerja, dan mempelajari, *learning*, pengetahuan dan praktek baru yang dapat meningkatkan hidup dan kerja. Tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup atau kerja yang digumuli secara lebih efisien dan efektif dari sebelumnya.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur pokok dari pembinaan yaitu: mendapatkan sikap (*attitude*) atau kecakapan (*skill*). Pengertian lain tentang pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Dalam pengertian ini ada dua unsur yakni: pertama, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu.

6. Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk:

- Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab,

kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.

- Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

C. METODE

Menurut Darmadi (2013) mendefinisikan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang empiris induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan

atlet bulutangkis. Dan fokus yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan atlet bulutangkis di Provinsi Jawa Timur

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur berlokasi di jalan Kayoon No.56, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271. Kantor Dispora Berlokasi di tengah kota surabaya.

Terbentuknya DISPORA Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda 32 tahun 2000 dengan Penambahan 1 (satu) Subdin Prasarana dan Sarana. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Maka diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, Pada Tahun 2016, terbit Pergub No.62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

1. Peran Dispora Provinsi Dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis.

Adapun Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan yaitu memberikan program peningkatan atlet, pelatih dan wasit, program pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi, program pembinaan atau pengembangan olahraga di kalangan

(SPOP) yaitu Sentral Pembinaan Olahraga pelajar. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

a) Menyiapkan Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi.

Menyiapkan Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinan, pengembangan dan pengawasan. Kemudian program yang di lakukan oleh dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan atlet di provinsi jawatimur yang telah di lakukan DISPORA dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan di jawatimur tentang tugas dan fungsi harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional maupun internasional dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang.

b) Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kepada Atlet yang Berprestasi dan penghargaan.

menurut undang-undang di negara indonesia, atlet yaitu pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut dengan olahragawan. Sesuai dengan undang-undang nomor Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional.

Lalu dengan program yang di lakukan oleh dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan atlet bulutangkis di jawa timur yang telah di lakukan oleh DISPORA dalam perundang-undang nomor Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional tentang atlet yang sudah berprestasi dalam olahraga dan di berikan penghargaan dalam bentuk uang pembinaan dan di berangkatkan dalam rana daerah, nasional maupun internasional.

c) Bekerjasama dengan Koni dan Unesa

Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi dengan koni dan unesa di provinsi jawa timur dengan maksud bekerjasama untuk membangun dan memberikan pembinaan kepada atlet di jawa timur agar atlet bisa menjadi profesional dan mampu bersaing dengan daerah atau antar provinsi. Kemudian juga program yang di lakukan oleh dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaatn atlet bulutangkis di jawa timur yang telah di lakukan oleh pihak DISPORA dalam perundang-undang nomor republik indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, Dinas pemuda dan olahraga dan koni memberikan wadah atau tempat untuk pengembangan atlet agar menjadi profesional.

Dan juga dinas pemuda dan olahraga melakukan koordinasi dengan kampus universitas surabaya (UNESA) dengan bermaksud bekerjasama untuk menciptakan pelatih yang handal dengan bersertifikat antar provinsi, kenapa DISPORA

melakukan kerja sama dengan UNESA di karena unesa sudah siap dengan sarana dan prasana di bandingkan dengan kampus di jawa timur.

2. Faktor Pendukung Pembinaan Atlet Bulutangkis di Jawa Timur.

Dalam menjalankan suatu program pemerintahan ada beberapa hal yang dapat membantu program kerja dinas pemuda dan olahraga dalam hal ini pembinaat atlet bulutangkis provinsi jawa timur. Dari penelitian ini yang di dapatkan penulis yang menjadi faktor pendukung oleh dinas pemuda dan olahraga ialah adanya sarana dan prasarana yang telah tersedia bagi atlet dan tempat atau wadah atlet berkumpul untuk melakukan aktifitas olahraganya dan pemerintah yang sangat membantu fasilitas untuk atlet dinas pemuda dan olahraga yang telah mendapatkan dukungan akan bekerja lebih maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan.

Ada faktor eskernal dan faktor internal dalam pembinaan bulutangkis:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Faktor inernal dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Bentuk tubuh

Bentuk tubuh atau faktor konstitusi tubuh antara lain adalah anthropometris, Postur dan struktur tubuh, seperti: ukuran tinggi dan panjang tubuh, ukuran besar, lebar dan berat tubuh, somatotype tubuh hal ini harus sesuai dengan olahraga yang diikutinya.

b. Kondisi fisik dan kemampuan fisik

Berdasarkan kriteria fisik meliputi: memiliki kemampuan otot mengatasi tahanan yang baik (kekuatan), mampu melakukan kerja dalam jangka waktu lama (daya tahan), memiliki kemampuan untuk bergerak dalam waktu yang cepat (kecepatan), kemampuan melakukan gerakan persendian melalui jangkauan daerah yang luas (fleksibilitas), kemampuan melakukan gerakan pada berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan tepat secara efisien (koordinasi). Fungsi organ-organ tubuh, seperti: daya kerja jantung, peredaran darah, daya kerja paru-paru, sistem pernapasan, daya kerja pernapasan, dan daya kerja panca indera bekerja dengan baik.

c. Penguasaan Tehnik yang Sempurna

Hal ini dapat dibuktikan dengan mampu mengaplikasikan teknik-teknik yang ada pada cabang olahraga tertentu dengan gerakan yang baik. Pada cabang olahraga bulutangkis atlet harus bisa menguasai dan mampu menerapkan tehnik pegangan, pijakan dan gerakan yang lain dan mudah di atasi.

d. Memiliki kematangan juara yang mantap

Memiliki kematangan juara yang mantap maksudnya atlet tersebut dalam menghadapi pertandingan apapun kondisinya, selalu memperlihatkan kejegan prestasi cabang olahraga yang diikutinya. yang dimaksud kematangan juara yang mantap yaitu kematangan penerapan kemampuan fisik, teknik, taktik dan mental atlet dalam pertandingan di mana prestasi telah konstan meskipun

menghadapi situasi, kondisi yang berbeda-beda dalam hal tempat, alat, lawan dan lingkungan.

e. Memiliki Aspek Kejiwaan dan Kepribadian

Untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin di samping memiliki prestasi fisik yang tinggi perlu motor penggerak dan pendorong dari aspek kejiwaan dan kepribadian. Salah satu bentuk aspek kejiwaan itu adalah motivasi dari diri atlet itu sendiri. Motivasi adalah suatu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu.

2) Faktor Eskternal

Faktor esktenal yaitu meliputi faktor yang berasal dari luar, meliputi:

a. Faktor Pelatih

Peran pelatih dalam pencapaian prestasi dan pembinaan sangat penting, berikut ini akan di jelaskan mengenai hakikat, kriteria atau syarat pelatih serta tugas-tugasnya. Pelatih dalam kaitanya pencapain prestasi merupakan bagian dari faktor esktenal, pelatih yang akan mengelolah atlet dan menjadikan sesuai dengan tujuabn yang di diharapkan. Faktor pelatih akan menunjang tercapainya prestasi yang maksimal apabila memiliki kriteria tertentu dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

b. Sarana dan Prasarana Pembinaan Bulutangkis

Faktor sarana dan prasarana juga merupakan faktor eskternal dalam pencapaian pembinaan atlet dan prestasi atlet, kedua faktor ini merupakan faktor

yang sangat penting karena sebagai fasilitas dalam peningkatan kualitas dan kemampuan pada atlet dalam semua cabang olahraga khususnya di cabang bulutangkis.

c. Dukungan Dana

Dukungan dana sangat berperan dalam pembinaan prestasi atlet, dengan adanya dana baik dari pemerintah maupun swasta program pembinaan akan berjalan dengan sesuai rencana.

d. Faktor Lingkungan

Menyatakan bahwa kondisi-kondisi lingkungan yang sifatnya menunjang aktifnya pembinaan dan prestasi atlet.

❖ Keluarga (khususnya orang tua)

Kondisi rumah yang sangat bersih dan rapih, tenang dan nyaman. Dan sopan santun dalam keluarga dan lingkungan keluarga yang senang dan mendukung dalam bidang olahraga. Akan memberikan perhatian pada sang atlet dalam mengikuti pembinaan atau program-program latihan maupun saat kompetisi. Belajar, berlatih, bekerja dan istirahat harus serasi. Hal ini bisa di berikan contoh yaitu pada keluarga datang menyaksikan anaknya (atlet) mengikuti pembinaan dan kompetisi.

❖ Pembina dan pelatih

Peran pelatih dan pembina dalam mengatur pola hidupnya misalnya, tidur yang teratur antara 8-10 jam perhari. Kehidupan yang sehari-hari yang teratur, hindari rokok, alkohol dan morphin Pengaturan makanan selalu segar sesuai dengan ilmu

gizi, pengaturan pola makan atlet harus selalu dikontrol agar kebugaran dan kesehatannya selalu terjaga. Kesehatan selalu dikontrol. Selain itu juga perlengkapan dan meteri yang memadai dan pekerjaan untuk hari depan serta keuangan perlu diperhatikan secukupnya.

e. Kompetisi

Kompetisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suksesnya pembinaan dan prestasi atlet, dan juga keikutansertaan atlet dalam kompetisi eksibisi memungkinkan atlet bisa mencapai kesiapan menghadapi kompetisi utama.

3. Faktor Penghambat Pembinaan Bulutangkis di Jawatimur.

Dalam melaksanakan tugasnya membina atlet, Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan salah satu yang harus di hadapi tentunya dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dari penelitian yang di dapatkan oleh penulis bahwa kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga adalah anggaran yang kurang bagi atlet untuk berangkat melakukan pertandingan dengan daerah lain kurangnya jam terbang membuat atlet kurang mendapatkan skil dan mental untuk mengikuti pertandingan atau kompetisi berskala nasional, walaupun adanya kendala bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Tetapi DISPORA akan memberikan yang terbaik bagi atlet bulutangkis di jawatimur.

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai Inovator.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Timur harus bisa menjadi inovator untuk atlet agar pembinaan di Jawa Timur tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala yang belum selesai terkait anggaran yang kurang baik. Dimana inovasi-inovasi sangat dibutuhkan dalam pembinaan atlet bulutangkis agar bisa meningkatkan prestasi atlet dan merencanakan program yang baik untuk pembinaan. Dan bisa menyediakan atau memfasilitasi kebutuhan untuk atlet bulutangkis.

5. Analisa Hasil penelitian dengan menggunakan teori Gede Diva

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan fasilitas terhadap atlet di Jawa Timur. Misalnya dengan memberikan fasilitas pelatihan terhadap atlet bulutangkis dan juga memadai segala kebutuhan atlet bulutangkis di Jawa Timur.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah mempersiapkan sebagai penyeimbang penyelenggaraan dengan membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pembinaan prestasi atlet di Jawa Timur khususnya di cabang bulutangkis. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi di lingkungan olahraga agar tetap bisa berprestasi.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang berisi tentang penjelasan tugas, fungsi dan tata kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas; b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas; c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda; d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kedua, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Bab IV Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pasal 9 Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi: a. olahraga pendidikan; b. olahraga rekreasi; dan c. olahraga prestasi. Pasal 10 (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, organisasi olahraga dan masyarakat. (2) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga; b. penyediaan dana keolahragaan; c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga; d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. (4) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut: a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk; b. proporsi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam

olahraga dibanding dengan jumlah penduduk; c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga; d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga; e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk; f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Katalisator menurut KBBI merupakan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Peran pemerintah sebagai Katalisator yakni pemerintah dalam hal ini berada diposisi sebagai aktor yang mempercepat pengembangan suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah sebagai katalisator dalam perkembangan atlet adalah mempercepat proses perkembangan untuk berprestasi menjadi juara. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah atau proses pembinaan terhadap atlet bulutangkis di Jawa Timur

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian terkait Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

(DISPORA) Provinsi di Jawa Timur yaitu:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan fasilitas terhadap atlet di Jawa Timur. Misalnya dengan memberikan fasilitas pelatihan terhadap atlet bulutangkis dan juga memadai segala kebutuhan atlet bulutangkis di Jawa Timur.

Penulis menyimpulkan bahwa dispORA sangat penting dalam pembinaan dan program di luar pembinaan karena dengan adanya program pelatihan maka Jawa Timur sudah mempunyai pelatih yang mempunyai sertifikat dan sudah di akui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu pemerintah mempersiapkan sebagai penyeimbang penyelenggaraan dengan membuat kebijakan-kebijakan sehingga pembinaan prestasi atlet di Jawa Timur khususnya di cabang bulutangkis. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi di lingkungan olahraga agar tetap bisa berprestasi.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah provinsi (DISPORA) dalam pembinaan atlet bulutangkis dalam hal ini peran pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagai regulator sudah berperan. Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai regulator adapun pembagian wewenang suatu

kebijakan baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam mengatur atlet di daerahnya masing-masing.

3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah sebagai katalisator dalam perkembangan atlet adalah mempercepat proses perkembangan untuk berprestasi menjadi juara. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah atau proses pembinaan terhadap atlet bulutangkis di Jawa Timur.

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan, bahwa dinas pemuda dan olahraga ini sudah sangat berjuang dalam hal suksesnya pembinaan meski dalam kejadian yang nyata perannya di DispORA ini belum kelihatan oleh atlet-atlet bulutangkis.

2. Rekomendasi

Penulis memberikan beberapa rumusan rekomendasi yang diharapkan mampu menjadi solusi perkembangan atlet dalam hal pembinaan dan peran pemerintah. Berikut rumusan rekomendasi yang diberikan penulis ialah:

1. Lebih meningkatkan pada aspek mental atlet yang dirasa sangat perlu untuk ditingkatkan, agar para atlet tidak mengalami demam panggung.
2. Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sarana-prasarana cabang olahraga yang dirasa masih

- butuh pembaharuan. Hal ini sangat diperlukan guna menunjang kualitas pelatihan dan pembinaan atlet. Jika beberapa cabang olahraga membutuhkan peralatan penunjang latihan, maka harap segera ditindaklanjuti. Namun jika fasilitas pendukung sudah sangat memadai, mungkin hanya dibutuhkan perawatann agar kualitas tetap terjaga.
3. Dispora diharapkan bisa menaikkan pamor cabang olahraga yang dianggap masih belum digemari oleh masyarakat di provinsi jawatimur. Hal ini bertujuan menarik minat potensi-potensi baru di cabang olahraga tersebut dan meningkatkan peluang dalam meraih hasil maksimal.
 4. Dispora provinsi agar bisa meningkatkan peran nya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal kegiatan olahraga di jawatimur. Dan meningkatkan fasilitas shuttlecock pembinaan dan pendanaan yang lebih baik.
- Asmadi, T. D. (2004). Sejarah Bulutangkis Indonesia. *Jakarta: Pengurus Besar PBSI*.
- Etikaesti, Lupong. *Peran Pbsi Terhadap Pembinaan Klub Bulutangkis di Kota Salatiga Tahun 2018*. Diss. Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015. *Jess (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 156-166.
- Putra, Ghazali Indra. "Analisis Peran Pelatih Terhadap Prestasi Bulutangkis Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Muara Olahraga* 1.1 (2018): 1-13.
- Putra, Ghazali Indra. "Peran Motivasi Internal Atlet Bulutangkis Untuk Berprestasi Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Muara Olahraga* 2.1 (2019): 199-207.
- Riastuti, E. R. (2019). *Peran Mata Kuliah Kemuhammadiyah (Aik Iii) Dalam Memperkuat Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Program Studi Ppkn Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.

REFERENSI

Aksan, H. (2013). *Mahir Bulu Tangkis*. Bandung: Nuansa Cendekia